

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Cibaliung Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Cibitung Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Cigeulis Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Cikeusik Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Cimanggu Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Panimbang Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Sobang Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Kabupaten Pandeglang, *Kecamatan Sumur Dalam Angka 2019*, Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019.
- BPS Republik Indonesia, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*, Jakarta: BPS Republik Indonesia, 2019.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, *Tinjauan Kondisi Makro Sosial Kabupaten Pandeglang 2017*, Pandeglang: Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, 2017.

- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung Nusa Media, 2009, Cetakan Kesatu.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, Cetakan Kesembilan.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Data dan Informasi Produk Unggulan di Kabupaten Tertinggal Kabupaten Pandeglang*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi, 2017.
- Matin, Kurdi, *Negara Pejabat Esai-Esai Politik, Demokrasi, Birokrasi dan Budaya*, Serang: Pustaka Alumi, 2015.
- Muttaqin, Entol Zaenal, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2014.
- Setiawan, Irfan, *Handbook Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: WR, tt.
- Sirajuddin, dkk (ed.), *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2017.
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syafe'i, Zakaria, *Negara Dalam Persepektif Islam Fiqih Siyasah*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, tt, Edisi Revisi.

Jurnal

- Ali, dkk, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Petita* Vol, 3. No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

- Bauw, Azis, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Legal Pluralism* Vol. 8, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, 2018.
- Hamid, Abdul, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Academica* Vol. 3 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, 2011.
- Kusnadi, Agus dan Bilal Dewansyah, "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dikaitan Dengan Tujuan Otonomi Daerah Seluas-luasnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi* Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2010.
- Marius, Jelamu Ardu, "Perubahan Sosial", *Jurnal Penyuluhan* Vol. 2 No. 2, Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Propetik* Vol. 1, No.1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Safitri, Sani, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Criksetra* Vol. 5, No. 9, Universitas Sriwijaya, 2016.

Skripsi

- Amroni, Yayan, Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hendrata, Ryan, Dampak Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Stabilitas Perekonomian di Kabupaten Bulungan, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, 2018.
- Jamaluddin, Ilham, Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014.
- Mariyani, Esa, Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok-Sumatera Barat, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Riyadi, Iwan, Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Carita dan Kecamatan Cibitung di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Majalah

Jatuh Bangun Otonomi Pasca Reformasi, Media BPP Jendela Informasi Kelitbangan, 2017.

Menelisik Sejarah Otonomi Daerah, Media BPP Jendela Informasi Kelitbangan, 2017.

Otonomi Daerah di Era Dua Orde Besar, Media BPP Jendela Informasi Kelitbangan, 2017.

Internet

<https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/calon-kabupaten-cibaliung>

<http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>

<https://geografi.ui.ac.id/portal/desentralisasi-otonomi-pemekaran-daerah-dan-pola-perkembangan-wilayah-di-indonesia/>

<https://pandeglangkab.bps.go.id>

<http://pandeglangkab.bps.go.id/statictable/2015/05/26/12/jumlah-desa-kelurahan-rukun-warga-dan-rukun-tetangga-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pandeglang-2013.html>.

<http://www.kelair.bppt.go.id/sitpapdg/profilkabpdg.htm>

<http://www.pandeglangkab.go.id>

<https://tengkuzone.wordpress.com/2012/05/04/otonomi-daerah-tujuan-pemekaran-dan-penggabungan-daerah/amp/>

Sumber Lainnya

Dokumen Laporan Penelitian Pembentukan Kabupaten Cibaliung, Pandeglang, 2005.

Mochamad Naim, Sekjen Bakor P2KC, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 6 Maret 2020.